

ABSTRAK

Erla Enovita. 2026. *Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang PPID di Desa Kebonagung, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun*. Skripsi. Program Studi Hukum, FH, UNIVERSITAS PGRI MADIUN. Pembimbing (I) Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H., (II) Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn.

Keterbukaan informasi publik merupakan hak konstitusional masyarakat yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai permasalahan, termasuk sengketa informasi pada badan publik di tingkat pusat maupun desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik, implementasi tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Desa Kebonagung, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, serta mengidentifikasi kendala dan upaya dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat deskriptif, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan kuesioner, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pengaturan keterbukaan informasi publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 beserta peraturan pelaksanaannya sebagai dasar hukum penyelenggaraan pelayanan informasi publik. Kedua, implementasi tugas dan wewenang PPID Desa Kebonagung pada umumnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 melalui pengelolaan, penyediaan, dan pelayanan informasi publik, meskipun beberapa tugas terkait informasi yang dikecualikan belum terlaksana secara faktual karena belum terdapat permohonan informasi. Ketiga, kendala pelaksanaan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, hambatan teknis pengelolaan informasi, serta belum adanya pengaturan khusus di tingkat Pemerintah Kabupaten Madiun mengenai pembinaan dan pengawasan PPID Desa. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan kapasitas aparatur desa, optimalisasi media informasi, penguatan koordinasi, dan dukungan kebijakan pemerintah daerah.

Kata Kunci : Keterbukaan Informasi Publik, PPID, Desa, Transparansi, *Good Governance*

ABSTRACT

Erla Enovita. 2026. *Implementation of Law Number 14 of 2008 on Public Information Disclosure in the Execution of Duties and Authorities of the Information and Documentation Management Officer (PPID) in Kebonagung Village, Balerejo District, Madiun Regency*. Skripsi. Law Departmen, UNIVERSITAS PGRI MADIUN. Advisor (I) Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H., (II) Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn.

Public information disclosure is a constitutional right guaranteed by law. However, its implementation continues to face various challenges, including public information disputes involving public bodies at both the central and village government levels. This study aims to analyze the legal basis for public information disclosure, the implementation of the duties and authorities of the Village Information and Documentation Management Officer (PPID) in Kebonagung Village, Balerejo District, Madiun Regency, and the obstacles and efforts in its implementation. This research employed an empirical juridical method with a descriptive approach, using statute and case approaches. Data were collected through library research, interviews, observations, and questionnaires, and analyzed qualitatively. The results indicate that, first, public information disclosure is governed by Law Number 14 of 2008 and its implementing regulations as the legal basis for public information services. Second, the implementation of the duties and authorities of the Village PPID has generally complied with Information Commission Regulation Number 1 of 2018 through the management, provision, and delivery of public information, although several duties concerning exempt information have not been implemented due to the absence of related requests. Third, the main obstacles include limited human resources, budget constraints, technical challenges in information management, and the absence of specific local regulations governing the guidance and supervision of Village PPIDs. Efforts undertaken include improving the capacity of village officials, optimizing information media, strengthening coordination, and enhancing local government policy support.

Keywords: Public Information Disclosure, PPID, Village, Transparency, Good Governance.